

Strategi Peningkatan Implementasi Program Bank Sampah Berbasis CBM di Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat

Mustika Berliantoro*, Neneng Sri Rahayu, Firman Hadi Rivai

Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

Email: mustika.2242021010@stialan.ac.id*, neneng.rdown@gmail.com,

firmanhadi@stialan.ac.id

Keywords:

Waste Bank; Waste Management; Sustainable Development; Community Based Management.

Abstract

Urban waste management is an environmental challenge that continues to increase along with population growth and economic activity in urban areas. One solution approach developed is the Waste Bank program, which emphasizes community participation in waste management at its source. This study aims to analyze the implementation of the Waste Bank program in West Cengkareng Village from a Community Based Management (CBM) perspective using a qualitative case study approach and to formulate an effective implementation strategy to support the program's sustainability. The results indicate that the Waste Bank program has been implemented and involves the community in waste management activities. However, community participation remains fluctuating and tends to be driven by short-term economic motivations. From an institutional perspective, an organizational structure has been established, but managerial and governance capacity is still suboptimal. Furthermore, waste management is still dominated by inorganic waste, while management of organic waste, the largest component of waste generation, is still limited, resulting in the program's suboptimal contribution to waste reduction. From a CBM perspective, program implementation is still at the participatory-operational stage and has not yet reached the institutional-consolidative stage. An integrated implementation strategy is needed through institutional strengthening, improving the quality of community participation, strengthening governance, developing multi-stakeholder collaboration, and integrating policies into regional development. This study also recommends the development of household-based organic waste banks as a strategic innovation to increase the effectiveness of waste reduction. This research contributes to the development of a community based waste management concept that is oriented not only towards economic aspects but also towards environmental sustainability and strengthening sustainable development governance.

Kata Kunci:

Bank Sampah; Pengelolaan Sampah; Pembangunan Berkelanjutan; Community Based Management.

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu tantangan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Salah satu pendekatan solusi yang dikembangkan adalah melalui

program Bank Sampah yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaksanaan program Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat dalam perspektif *Community Based Management* (CBM) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode studi kasus, serta menyusun strategi implementasi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bank Sampah telah berjalan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Namun, partisipasi masyarakat masih fluktuatif dan cenderung didorong oleh motivasi ekonomi jangka pendek. Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi telah terbentuk, namun kapasitas manajerial dan tata kelola masih belum optimal. Selain itu, pengelolaan sampah masih didominasi oleh sampah anorganik, sementara pengelolaan sampah organik sebagai komponen terbesar dari timbunan sampah masih terbatas, sehingga kontribusi program terhadap pengurangan sampah belum optimal. Dalam perspektif CBM, ditunjukkan bahwa implementasi program masih pada tahap partisipatif-operasional, belum mencapai tahap kelembagaan-konsolidatif. Diperlukan strategi implementasi yang terintegrasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, penguatan tata kelola, pengembangan kolaborasi multipihak, serta integrasi kebijakan dalam pembangunan daerah. Penelitian ini juga merekomendasikan pengembangan Bank Sampah organik berbasis rumah tangga sebagai inovasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengurangan sampah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah telah menjadi tantangan krusial pada tingkat global dan nasional. Dengan peningkatan urbanisasi dan konsumsi, volume limbah padat di kota-kota besar terus bertambah, menimbulkan tekanan terhadap sistem sanitasi, ekosistem, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ASEAN skor indeks rata-rata pengelolaan sampah padat yang mencerminkan upaya efektif dalam sistem daur ulang, pengumpulan dan pengendalian material limbah melalui recycling, composting, atau landfill sanitation sebesar 39,6. Negara Singapura menempati posisi tertinggi dengan skor indeks sekitar 75,5, disusul Vietnam 46,1 dan Laos 42,6. Sebaliknya, Indonesia menduduki peringkat terbawah di kawasan ASEAN dengan skor hanya 26,7 (Environmental Performance Index-EPI, 2024), menunjukkan masih rendahnya tingkat pengelolaan yang terkontrol dan pemulihan material dibanding negara-negara tetangga. Perbandingan ini tidak hanya mencerminkan disparitas dalam pengelolaan teknis, tetapi juga implikasi ekonomi dan lingkungan yang nyata.

Di Singapura, tingkat pengelolaan yang tinggi selaras dengan pengembangan industri pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi signifikan, di negara ini sektor daur ulang dan pemulihan energi yang pada tahun 2023 diperkirakan bernilai USD 3,03 miliar, hal ini menunjukkan bagaimana pengelolaan limbah yang efektif turut menciptakan peluang ekonomi

yang kuat. (Sumber: <https://www.nextmsc.com/report/singapore-waste-management-market>. diakses Februari 2026).

Dalam ruang lingkup ASEAN, beberapa negara dengan skor pengelolaan sampah lebih tinggi umumnya didukung oleh kebijakan yang kuat, teknologi pengolahan yang canggih, sistem pemilahan yang efisien di tingkat rumah tangga, serta insentif ekonomi yang jelas bagi partisipasi masyarakat (Agamuthu P, et.al 2023). Hal ini sejalan dengan tren regional yang memperlihatkan bahwa peningkatan skor pengelolaan limbah sering kali berkorelasi dengan efektivitas, penegakan, dan kepraktisan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan, pertumbuhan sektor industri pengolahan limbah, peningkatan penggunaan teknologi daur ulang, dan keterlibatan sektor swasta dalam inovasi pengelolaan limbah

Sebaliknya, meskipun Indonesia menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar, sekitar 56,63 juta ton sampah sepanjang 2023 (sumber : <https://www.kemenvh.go.id/news/detail/klh-bplh-tegaskan-arrah-baru-menuju-indonesia-bebas-sampah-2029-dalam-rakornas-pengelolaan-sampah-2025> ,diakses Februari 2026), tingkat pemulihan sampah nasional terlihat sangat rendah, dengan score indeks 26,7 jauh di bawah negara ASEAN dengan score indeks rata-rata sebesar 39,6. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur pengelolaan sampah di Indonesia masih lemah dan masih didominasi oleh pendekatan pembuangan akhir dengan tingkat *recycling* yang terbatas.

Produksi sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi seperti di kota besar seperti Jakarta telah menimbulkan masalah serius, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di Indonesia, timbulan sampah masih di dominasi oleh rumah tangga dan pasar tradisional yaitu sebesar lebih dari 70% sebagaimana terlihat dalam gambar 1.2. Menurut data yang dihimpun BPS dalam Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2025 yang bersumber dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), disampaikan bahwa pada tahun 2024 timbulan sampah mencapai lebih dari 34 juta ton, namun hanya sekitar 60% yang dapat terkelola dengan baik, sementara sisanya masih menumpuk di TPA atau mencemari lingkungan. Hal ini diperparah oleh kepadatan penduduk di wilayah perkotaan serta ketidakmerataan infrastruktur dan pengelolaan limbah. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut pengaturan yang lebih efisien dan partisipatif dalam pengelolaan sampah agar dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi bisa dikurangi.

Isu sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar baik secara global maupun nasional, isu ini sangat relevan dalam konteks manajemen pembangunan daerah, terutama program-program berbasis masyarakat seperti Bank Sampah, yang diharapkan tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. (Namira A.T, et.al 2025)

Dalam konteks lokal seperti Jakarta serta kota besar lainnya di Indonesia, tingginya timbulan sampah serta keterbatasan kapasitas tempat pemrosesan akhir menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah konvensional belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, berbagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti program Bank Sampah, dikembangkan sebagai alternatif yang menekankan partisipasi warga dan pemberdayaan komunitas. Bank Sampah sebagai salah satu fasilitas pengelolaan sampah dengan jumlah terbesar di Indonesia, dimana berdasarkan data SIPSN tahun 2025 mencapai 67,22% dari total

fasilitas pengolahan sampah yang ada, juga terbanyak melibatkan masyarakat secara langsung, tapi Bank Sampah masih belum cukup untuk mengatasi timbulan sampah yang besar dari tengah masyarakat yang didominasi sampah organik rumah tangga.

Dalam konteks manajemen pembangunan daerah, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang semata sebagai urusan teknis, melainkan sebagai bagian dari tata kelola publik yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aktor lokal. Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengurangan dan penanganan sampah, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Dalam konteks ini, konsep *Good Environmental Governance* (GEG) atau Tata kelola lingkungan yang baik menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Teori yang dikembangkan oleh Belbase (2010) ini menegaskan bahwa *Good Environmental Governance* menekankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, serta keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dan kelembagaan mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara konsisten.

Dalam pengelolaan sampah, prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* menjadi sangat relevan karena permasalahan sampah merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Bank Sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat dipandang sebagai salah satu praktik implementasi prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka *Good Environmental Governance*. Melalui Bank Sampah, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Merujuk Hasil penelitian Candrakirana (2015) yang mengkaji penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kekuatan penegakan hukum lingkungan, dukungan kelembagaan pemerintah daerah, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan. Candrakirana (2015) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat perlu diimbangi dengan komitmen pemerintah dan kerangka regulasi yang jelas agar tata kelola lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah, Undang-undang no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menugaskan pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dikeluarkan untuk semakin mempertegas dukungan terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui fasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang dan guna ulang sampah, sebagaimana yang berkembang dalam bentuk kelembagaan Bank Sampah di masyarakat saat ini.

Semangat ini sejalan dengan konsep pengelolaan berbasis masyarakat atau *Community Based Management* (CBM) yang dikembangkan oleh Ostrom (1990) dan disempurnakan oleh

(Agrawal & Gibson, 1999) dimana masyarakat dapat mengelola sumber daya tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, kelembagaan lokal, dan insentif ekonomi dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memposisikan program Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat sebagai bagian dari praktik tata kelola lingkungan yang baik di tingkat lokal dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat yang belum optimal berdasarkan perspektif *Community Based Management* (CBM).

Fokus penelitian tidak hanya pada keberadaan program Bank Sampah, tetapi pada proses, dinamika, dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan program sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat. Pendekatan *Community Based Management* (CBM) dinilai relevan karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas lokal dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat telah diidentifikasi sebagai komponen kunci dalam mendukung efektivitas program lingkungan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian "*Supporting Factors for Community Participation in the Waste Bank Program: A Study in Sleman Regency of Indonesia*" menemukan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan, sikap, manfaat ekonomi, dukungan institusi, dan akses terhadap fasilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan warga dalam program Bank Sampah di Sleman. (Astuti, et.al 2021). Demikian pula, penelitian di Semarang menemukan bahwa *knowledge* dan *attitude* warga memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi dalam Bank Sampah. (Gunawan, M. A, et.al 2023). Oleh karena itu, CBM menjadi salah satu strategi penting dalam kebijakan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Namun demikian, tren dan tantangan terkini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat baik dalam beberapa program CBM Sampah melalui Bank Sampah, keberlanjutan dari program tersebut, termasuk stabilitas finansial, kontinuitas dukungan institusi, dan dampak nyata terhadap pengurangan volume sampah seringkali tidak memadai. Contoh lain: studi "Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen, Kota Semarang" memperlihatkan bahwa meskipun warga dilibatkan dalam evaluasi dan kegiatan rutin, adanya keterbatasan sarana prasarana dan dukungan eksternal menyebabkan hambatan dalam perkembangan jangka panjang. (Agus Riyadi, et.al 2022). Selain itu, penelitian di Desa Semabung, Sumbawa menunjukkan bahwa program yang aktif dan produktif bisa tetap mengalami masalah jika partisipasi masyarakat tidak diikuti oleh kapasitas pengelolaan yang memadai. (Burhanuddin, et.al 2021).

Jika dibandingkan antar daerah, terdapat variasi dalam efektivitas pengelolaan sampah. Surabaya berhasil mengurangi sampah ke TPA melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah Induk yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah kota. Yogyakarta juga menunjukkan keberhasilan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, DKI Jakarta menghadapi permasalahan yang lebih kompleks, berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai 3.171.247,45 ton per tahun atau 8.664,61 ton per hari dengan trend semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana sebagian besar sampah berakhir di TPA

Bantargebang kota Bekasi. Kondisi ini menjadikan Jakarta salah satu daerah dengan risiko krisis sampah paling tinggi di Indonesia.

Secara lebih spesifik, berdasarkan data SIPSN tahun 2023 Kecamatan Cengkareng kota administrasi Jakarta Barat yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan menjadi salah satu wilayah dengan tingkat timbulan sampah terbesar di Kota Administrasi Jakarta Barat dan merupakan nomor dua penyumbang timbulan sampah terbesar pada tingkat kecamatan di DKI Jakarta yaitu sebesar 409 ton per hari setelah Kecamatan Cakung dengan timbulan sampah sebesar 412 ton per hari atau hanya berselisih 3 ton per hari. Lebih lanjut berdasarkan data SIPSN di tahun berikutnya (2024) yang disajikan dalam tabel 1.1, Kecamatan Cengkareng secara total berkontribusi sebesar 19% atau yang terbesar dari total sampah per kecamatan yang diangkut Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat ke TPA Bantar Gebang.

Berdasarkan informasi satuan pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng pada tahun 2024, Kelurahan Cengkareng Barat sebagai lokasi pusat pemerintahan Kecamatan Cengkareng rata-rata menyumbang 19 % s/d 20% timbulan sampah per hari di Kecamatan Cengkareng. Selain pusat pemerintahan Kecamatan dengan berbagai fasilitas layanan masyarakat yang lengkap dan beragam, Kelurahan Cengkareng Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu mencapai 82.798 orang dengan rasio kepadatan penduduk 20.994.54 orang/km² di tahun 2024 (Dinas Dukupil DKI Jakarta, Profil Perkembangan Kependudukan 2024).

Kelurahan Cengkareng Barat berada di perbatasan dengan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat yang berada tidak jauh dari Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang terhubung melalui jalan tol dan jalan arteri antar provinsi, dimana di daerah tersebut banyak terdapat industri yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah daur ulang. Disamping posisi strategis itu juga Kelurahan Cengkareng Barat merupakan lokasi Bank Sampah Induk (BSI) terbesar di DKI Jakarta yang melayani 783 Bank Sampah Unit (BSU) di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Jumlah penduduk yang tinggi dan posisi strategis Kelurahan Cengkareng Barat dan adanya lokasi BSI Jakarta Barat, mendorong bermunculannya para pengepul sampah baik berupa Bank Sampah Unit (BSU) yang terdaftar oleh pemerintah maupun masyarakat pengepul yang memilah sampah secara mandiri untuk dijual ke Bank Sampah Induk (BSI) ataupun langsung ke industri daur ulang.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi adalah minimnya kajian yang secara khusus menganalisis implementasi program Bank Sampah dari perspektif CBM di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, serta merumuskan strategi implementasi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan program. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi program Bank Sampah dari perspektif CBM, menganalisis dinamika partisipasi masyarakat, kelembagaan komunitas, serta dukungan tata kelola pemerintah, dan merumuskan strategi implementasi yang terintegrasi dan kontekstual dengan kondisi lapangan.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat Kelurahan Cengkareng Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat timbulan sampah terbesar di Kecamatan Cengkareng, yang berkontribusi sebesar 19% dari total sampah per kecamatan yang diangkut Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat ke TPA Bantar Gebang. Berdasarkan data SIPSN tahun 2023, Kecamatan Cengkareng menjadi wilayah dengan tingkat timbulan sampah terbesar kedua di DKI Jakarta yaitu sebesar 409 ton per hari setelah

Kecamatan Cakung dengan timbulan sampah sebesar 412 ton per hari. Jumlah penduduk yang tinggi mencapai 82.798 orang dengan rasio kepadatan penduduk 20.994,54 orang/km² di tahun 2024, dan posisi strategis Kelurahan Cengkareng Barat sebagai lokasi Bank Sampah Induk (BSI) terbesar di DKI Jakarta yang melayani 783 Bank Sampah Unit (BSU) di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, menjadikan penelitian ini semakin relevan untuk dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam program Bank Sampah relatif tinggi, kontribusi program terhadap pengurangan volume sampah secara keseluruhan masih belum optimal, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi peningkatan implementasi.

Hal ini menunjukkan adanya partisipasi publik yang tampaknya tinggi dalam sisi pengumpulan, pemilahan, dan setoran sampah melalui Bank Sampah, dengan jumlah Bank Sampah Unit (BSU) terdata sejumlah 88 unit menurut website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 (Sumber : <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/bsu>, diakses Januari 2026) jumlah tersebut merupakan yang terbesar di Kecamatan Cengkareng dari total 265 BSU yang tersebar di 6 Kelurahan, Hal ini menciptakan paradoks: bagaimana partisipasi yang tinggi tidak selalu tercermin dalam penurunan volume sampah secara signifikan. Observasi lapangan menegaskan bahwa beberapa bank sampah masih mengalami hambatan logistik, kurangnya fasilitasi dalam pengangkutan dan pemrosesan sampah, dan variabilitas dalam dukungan kebijakan lokal, yang semua dapat memengaruhi efektivitas jangka panjang.

Dengan demikian, penelitian mengenai Strategi Peningkatan Implementasi Program Bank Sampah Berbasis CBM di Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Refleksi atas urgensi permasalahan sampah perkotaan dan paradoks antara tingginya partisipasi masyarakat dengan masih besarnya volume sampah menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu mengarahkan perumusan masalah secara tajam dalam menilai sejauh mana program Bank Sampah benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah serta peningkatan kualitas lingkungan dan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian dalam konteks alamiah (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin menggali secara komprehensif suatu permasalahan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Sementara itu, Moleong (2017) menekankan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena secara holistik dengan memanfaatkan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, Yin (2018) menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus sangat tepat digunakan ketika penelitian berfokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi pelaksanaan program Bank Sampah berbasis *Community Based Management* (CBM), yang melibatkan interaksi kompleks antara partisipasi masyarakat, kelembagaan komunitas, serta dukungan kebijakan dan tata kelola pemerintah. Fenomena tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan perlu dipahami melalui perspektif pelaku, pengalaman empiris, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai untuk menggali secara mendalam proses, makna, dan dinamika implementasi program Bank Sampah, khususnya dalam memahami bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk, bagaimana kelembagaan komunitas berfungsi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan program.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Cengkareng Barat sebagai lokasi penelitian, yang dipilih karena memiliki karakteristik unik sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dalam program Bank Sampah, namun masih menghadapi tantangan dalam pengurangan volume sampah secara keseluruhan..

Penelitian dilakukan di Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah Bank Sampah cukup banyak namun masih menyumbang volume sampah signifikan ke TPA Bantar Gebang. Pemilihan lokasi didasarkan pada dua alasan utama, yang pertama karena terdapat paradoks antara partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dalam program Bank Sampah dengan kondisi timbulan sampah yang masih besar, dan yang kedua karena Cengkareng Barat merepresentasikan kompleksitas permasalahan perkotaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan, mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual pada satu lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Cengkareng Barat, yang memiliki program Bank Sampah aktif dengan tingkat partisipasi masyarakat yang relatif tinggi namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan pandangan para aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bank Sampah sekaligus menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota Bank Sampah relatif cukup banyak (ditandai dengan tingginya jumlah warga yang terdaftar), tingkat partisipasi aktif masih berada pada kisaran terbatas. Dari keseluruhan anggota, hanya sebagian yang secara rutin melakukan penyetoran sampah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi nominal (keanggotaan) dan partisipasi aktual (keterlibatan aktif).

Dari sisi kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Bank Sampah telah terbentuk, namun kapasitas pengelola masih terbatas. Sebagian besar pengurus menjalankan tugas secara sukarela, sehingga terdapat keterbatasan dalam hal waktu, tenaga,

dan kemampuan manajerial. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan program, khususnya dalam hal administrasi, inovasi kegiatan, dan pengembangan program.

Sementara itu, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta juga telah ada, namun belum bersifat konsisten dan terintegrasi. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat insidental, seperti sosialisasi kebijakan atau pemberian fasilitas dengan pendampingan yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola program belum berjalan secara sistematis.

Secara keseluruhan, data empiris tersebut menunjukkan adanya pola yang konsisten, yaitu:

1. Tingginya keanggotaan tidak berbanding lurus dengan partisipasi aktif
2. Motivasi ekonomi lebih dominan dibanding kesadaran lingkungan
3. Kelembagaan sudah terbentuk namun belum kuat
4. Dukungan eksternal sudah ada namun belum berkelanjutan

Pola-pola tersebut mengindikasikan bahwa implementasi program Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat masih berada dalam tahap perkembangan awal dan belum mencapai kondisi kelembagaan yang matang.

Pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi dan analisis kondisi implementasi pelaksanaan program Bank Sampah, tetapi juga diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu terkait dengan strategi implementasi yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan program.

Berdasarkan temuan empiris yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat adanya berbagai tantangan dalam aspek partisipasi masyarakat, kelembagaan komunitas, serta dukungan tata kelola. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada upaya merumuskan strategi yang relevan dan kontekstual dengan kondisi lapangan, dengan mengacu pada perspektif *Community Based Management (CBM)* serta didukung oleh pendekatan administrasi publik dan manajemen pembangunan daerah.

Strategi yang dirumuskan diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas partisipasi, serta mendorong integrasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat.

Analisis Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini membandingkan perspektif aparat pemerintahan dalam hal ini kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup, perspektif pengelola Bank Sampah, dan perspektif warga sebagai anggota Bank sampah dalam tabel 1.

Tabel 1. Analisis Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan

Tema	Pemerintah (DLH & Kelurahan)	Pengelola Bank Sampah	Warga sebagai anggota	Analisis
Peran Bank Sampah	Instrumen kebijakan	Sarana pengelolaan	Tabungan sampah	Perbedaan persepsi
Partisipasi	Penting tapi fluktuatif	Aktif terbatas	Praktis-ekonomis	Belum kolektif
Kelembagaan	Perlu diperkuat	Masih informal	Tidak terlibat	Lemah
Tantangan	Koordinasi dan SDM	Konsistensi	Motivasi	Risiko keberlanjutan
Strategi	Kolaborasi	Pelatihan	Edukasi	CBM kolaboratif

Analisis ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Bank Sampah sangat ditentukan oleh keselarasan peran dan persepsi pemangku kepentingan, yang saat ini masih belum sepenuhnya terbangun.

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat menunjukkan pola yang cukup aktif namun fluktuatif. Secara administratif, jumlah anggota terdaftar relatif banyak, namun tingkat partisipasi rutin tidak selalu stabil. Keaktifan warga cenderung meningkat ketika terdapat insentif ekonomi atau kegiatan tertentu, sedangkan pada periode biasa partisipasi mengalami penurunan. Dari sisi motivasi, faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat untuk bergabung. Manfaat berupa tabungan atau tambahan pendapatan, meskipun tidak besar, menjadi daya tarik awal partisipasi. Namun demikian, seiring waktu muncul kesadaran lingkungan sebagai motivasi sekunder. Artinya, terjadi pergeseran motivasi dari instrumental ekonomis menuju kesadaran ekologis, meskipun faktor ekonomi tetap dominan.

Dalam aspek keterlibatan kelembagaan, sebagian besar anggota memposisikan diri sebagai peserta atau penyeton sampah, bukan sebagai bagian dari pengelola. Proses pengambilan keputusan dan manajemen operasional lebih banyak dilakukan oleh pengurus. Meski demikian, anggota tetap dilibatkan dalam bentuk sosialisasi atau pertemuan berkala. Peran pengurus dinilai cukup aktif, terutama dalam komunikasi melalui grup WhatsApp dan pengaturan jadwal. Namun terdapat keterbatasan kapasitas karena sifat kepengurusan yang sukarela dan bukan pekerjaan utama. Hal ini berdampak pada konsistensi pengelolaan dan kesinambungan program.

Tantangan utama yang muncul adalah:

1. Konsistensi partisipasi anggota
2. Keterbatasan dukungan fasilitas, sarana dan prsarana
3. Minimnya insentif bagi pengurus
4. Kurangnya penguatan kelembagaan

Adapun harapan responden terhadap keberlanjutan program adalah agar Bank Sampah tidak hanya sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap:

1. Pengurangan volume sampah dan perbaikan lingkungan
2. Peningkatan kesejahteraan warga
3. Penguatan kapasitas kelembagaan

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh interaksi antara motivasi ekonomi, kualitas tata kelola berbasis komunitas, serta dukungan kelembagaan yang konsisten.

Analisis Dalam Dimensi CBM

Salah satu prinsip utama CBM adalah proses penguatan peran masyarakat secara bertahap dalam pengelolaan sumber daya atau program publik. Menurut Ostrom (1990) dan Agrawal et.al (1999), keberhasilan pengelolaan berbasis komunitas bergantung pada:

- a) Partisipasi masyarakat,
- b) Kelembagaan
- c) Insentif Ekonomi
- d) Kepemimpinan Lokal
- e) Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Dalam praktiknya, pengelolaan komunitas tidak langsung kuat sejak awal, tetapi berkembang dengan tahap :

- a. Pembentukan partisipasi awal (*Initiation of collective action*)-Tahap Inisiasi
- b. Pengelolaan operasional oleh komunitas (*Operational management by community*)-Tahap Partisipatif Operasional
- c. Konsolidasi kelembagaan komunitas (*Institutional consolidation*)- Tahap Kelembagaan Konsolidatif

Hubungan antar tema utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah. Keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah menjadi alasan awal masyarakat untuk terlibat sebagai anggota dan melakukan penyeteroran sampah secara rutin. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi kekuatan kelembagaan komunitas yang mengelola program Bank Sampah.

Dengan Kelembagaan komunitas yang aktif dan terorganisasi dengan baik akan mampu melahirkan kepemimpinan lokal dan hubungan yang lebih baik antar pemangku kepentingan yang mendorong keterlibatan secara lebih konsisten elemen masyarakat, baik di dalam maupun di luar komunitas Bank Sampah. Di sisi lain, keberlangsungan kelembagaan komunitas tersebut tidak terlepas dari dukungan tata kelola pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan, kebijakan, maupun fasilitasi program. Tanpa dukungan tersebut, kapasitas organisasi komunitas dalam mengelola program menjadi terbatas. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai hambatan implementasi, seperti fluktuasi partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang tepat untuk memperkuat kelembagaan komunitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan program berkelanjutan Bank Sampah tetap berjalan dalam jangka panjang.

Strategi Peningkatan Implementasi Program Bank Sampah

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat dirumuskan strategi peningkatan implementasi program Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat yang bersifat integratif. Strategi ini disusun untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan bank sampah.

Strategi ini berangkat dari temuan utama penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi program Bank Sampah masih berada pada tahap partisipatif-operasional, yang ditandai dengan partisipasi masyarakat yang belum stabil, kelembagaan komunitas yang belum

kuat, serta tata kelola dan dukungan eksternal yang belum optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tidak hanya bersifat parsial, tetapi terintegrasi antar dimensi. Strategi yang akan disusun diawali dengan memotret kondisi eksisting sebagai input, proses strategi itu sendiri, output dan dampak jangka panjang (outcome).

1. Input (Kondisi Eksisting)

Komponen ini menggambarkan kondisi awal implementasi program, meliputi:

a. Pola Keterlibatan Pengurus Bank Sampah

Mayoritas pengurus Bank Sampah awalnya bergabung sebagai nasabah biasa sebelum akhirnya menjadi pengelola aktif. Hal ini menunjukkan bahwa proses partisipasi berkembang secara bertahap dari keterlibatan sederhana menuju keterlibatan struktural.

Temuan penting:

(1) Sebagian besar pengurus direkrut karena:

1. aktif menyeter sampah;
2. sering hadir rapat;
3. membantu administrasi;
4. atau dianggap memiliki kemampuan koordinasi masyarakat.

(2) Sebagian kecil pengurus direkrut langsung oleh kelurahan atau pengurus lama sejak awal pembentukan Bank Sampah;

(3) Keterlibatan pengurus berbasis sukarela (voluntary participation), bukan pekerjaan formal;

Model partisipasi ini menunjukkan karakteristik Community Based Management (CBM), yaitu pengelolaan berbasis masyarakat yang tumbuh dari partisipasi warga sendiri.

b. Partisipasi Masyarakat Bersifat Fluktuatif

Seluruh pengurus menyatakan bahwa jumlah anggota Bank Sampah cukup banyak secara administratif, tetapi tingkat keaktifan masyarakat tidak stabil. Karakteristik partisipasi :

(1) Banyak warga terdaftar sebagai nasabah;

(2) Tidak semua rutin menyeter sampah;

(3) Partisipasi meningkat ketika ada insentif, program khusus, hadiah atau pembagian hasil.

Partisipasi masyarakat masih bersifat instrumental dan situasional, belum sepenuhnya berbasis kesadaran lingkungan yang berkelanjutan.

c. Faktor Ekonomi Menjadi Motivasi Dominan

Baik pengurus maupun warga menyatakan bahwa alasan utama masyarakat mengikuti Bank Sampah adalah faktor ekonomi.

Temuan rinci:

(1) Sampah dianggap memiliki nilai jual atau tabungan tambahan;

(2) Manfaat finansial menjadi daya tarik utama;

(3) Kesadaran lingkungan muncul setelah masyarakat terbiasa mengikuti program.

Warga mengungkapkan bahwa:

- a) awalnya tertarik karena “sampah bisa jadi uang,”
- b) kemudian berkembang menjadi kebiasaan memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kesadaran ekologis masyarakat terbentuk melalui pendekatan ekonomi terlebih dahulu (*economic-driven participation*).

d. Kesadaran Lingkungan Masih Belum Menjadi Faktor Utama

Walaupun terdapat peningkatan kepedulian lingkungan, sebagian besar responden menyatakan bahwa motivasi lingkungan masih kalah dibanding kebutuhan ekonomi sehari-hari. Temuan ini menunjukkan:

- (1) Kepedulian lingkungan masih bersifat sekunder;
- (2) Perilaku ramah lingkungan belum sepenuhnya menjadi budaya masyarakat;
- (3) Partisipasi lebih dipengaruhi manfaat langsung.

Program Bank Sampah belum sepenuhnya berhasil mentransformasikan kesadaran ekologis menjadi perilaku sosial yang stabil.

e. Peran Pemerintah Kelurahan Bersifat Fasilitatif

Pengurus menilai kelurahan cukup mendukung program Bank Sampah, terutama dalam pembinaan, legalitas, koordinasi, dan perizinan kegiatan. Namun ditemukan beberapa keterbatasan:

- (1) Bantuan fasilitas belum rutin;
- (2) Pelatihan masih minim;
- (3) Pendampingan belum berkelanjutan.

Pihak Kelurahan juga menegaskan bahwa perannya lebih sebagai fasilitator dan koordinator kebijakan pemerintah daerah. Hal di atas menunjukkan bahwa dukungan pemerintah sudah ada secara administratif, tetapi belum optimal pada aspek penguatan kapasitas dan keberlanjutan kelembagaan.

f. Pemahaman Pengurus terhadap Regulasi Masih Umum

Sebagian besar pengurus mengetahui adanya Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Bank Sampah, tetapi belum memahami isi regulasi secara detail. Karakteristik pemahaman:

- (1) Hanya mengetahui garis besar kebijakan;
- (2) Belum memahami pasal teknis;
- (3) Implementasi lebih banyak berdasarkan praktik lapangan.

Temuan ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan normatif dan pemahaman implementatif di tingkat pengelola komunitas.

g. Konsistensi dan Regenerasi Pengurus

Seluruh kelompok responden menyoroti masalah keberlanjutan pengelolaan Bank Sampah dengan tantangan utama :

- (1) Pengurus bekerja secara sukarela;
- (2) Muncul kejenuhan dan kelelahan;
- (3) Minim insentif;
- (4) Regenerasi belum berjalan optimal;
- (5) Partisipasi warga tidak konsisten.

Temuan pentingnya adalah bahwa pengurus mengakui bahwa tanpa regenerasi, dukungan dan insentif program dapat stagnan bahkan berhenti. Dengan demikian dapat

dimaknai bahwa sistem pengelolaan masih sangat bergantung pada semangat individu, belum berbasis kelembagaan yang kuat.

h. Kelembagaan Bank Sampah Masih Lemah

Pengurus dan pihak pemerintah sama-sama menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dengan kebutuhan utama:

- (1) Pelatihan manajemen,
- (2) Peningkatan kapasitas organisasi,
- (3) Penguatan struktur pengelola,
- (4) Profesionalisasi pengelolaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sampah masih berjalan sebagai gerakan sosial komunitas, belum berkembang menjadi organisasi pengelolaan lingkungan yang profesional.

i. Kolaborasi Eksternal Dipandang Penting

Kolaborasi dengan eksternal dipandang sebagai faktor penting dalam pengelolaan Bank Sampah, banyak pengurus mengusulkan kerja sama CSR, kemitraan dengan swasta, meningkatkan dukungan perusahaan dan perluasan jaringan eksternal dengan tujuan kolaborasi untuk menambah pendanaan, meningkatkan inovasi, dan memperkuat keberlanjutan program.

Pihak Sudin LH juga menegaskan pentingnya integrasi lintas sektor, kemitraan swasta, dan integrasi dengan TPS3R.

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk keberlanjutan Bank Sampah dibutuhkan model *collaborative governance* antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

j. Bank Sampah Dipandang Sebagai Instrumen Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Pihak Sudin Lingkungan Hidup menempatkan Bank Sampah sebagai instrumen utama pengurangan sampah dari sumber, sarana edukasi masyarakat, dan media perubahan perilaku lingkungan, namun ditemukan bahwa :

- (1) Dampak terhadap pengurangan volume sampah kota belum maksimal,
- (2) Integrasi dengan sistem pengelolaan sampah perkotaan masih lemah.

Hal ini memperlihatkan bahwa secara kebijakan Bank Sampah diprioritaskan, tetapi implementasi operasionalnya masih menghadapi hambatan kelembagaan dan sosial.

k. Permasalahan Teknis di Tingkat Anggota/Warga

Anggota Bank Sampah menyampaikan beberapa kendala praktis sebagai berikut :

- (1) Jadwal penyeteran tidak selalu cocok,
- (2) Cuaca dan kesibukan memengaruhi kehadiran,
- (3) Kebingungan jenis sampah yang diterima,
- (4) Sosialisasi teknis masih kurang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah teknis operasional turut memengaruhi stabilitas partisipasi masyarakat.

l. Pengurus Dinilai Aktif tetapi Memiliki Keterbatasan

Warga memberikan penilaian bahwa pengurus cukup aktif, komunikatif, responsif terhadap kegiatan dan rutin mengingatkan jadwal kegiatan Bank Sampah melalui WhatsApp. Di sisi lain warga juga memahami bahwa pengurus memiliki pekerjaan utama lain, kapasitas waktu dan tenaga terbatas dan pengelolaan masih

berbasis relawan. Hal ini menunjukkan terdapat kepercayaan sosial masyarakat terhadap pengurus, tetapi kapasitas organisasi masih terbatas secara struktural.

m. Harapan terhadap Masa Depan Bank Sampah

Seluruh kelompok responden berharap Bank Sampah lebih profesional, lebih berkelanjutan, memiliki dampak nyata terhadap pengurangan sampah, meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat partisipasi masyarakat. Harapan strategis yang muncul dari hal tersebut adalah :

- (1) Penguatan kelembagaan,
- (2) Dukungan pemerintah lebih konsisten,
- (3) Penghargaan bagi pengelola,
- (4) Peningkatan manfaat ekonomi,
- (5) Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

2. Proses (Strategi Implementasi)

Berdasarkan hasil wawancara pengurus Bank Sampah, anggota masyarakat, Kelurahan Cengkareng Barat, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, ditemukan sejumlah permasalahan yang dapat diurutkan berdasarkan tingkat dominasi dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan program Bank Sampah. Berikut rincian permasalahan beserta strategi pemecahan jangka pendek dan jangka panjangnya.

3. Output (Kondisi yang Diharapkan)

Apabila strategi tersebut berjalan secara konsisten, maka output atau kondisi yang diharapkan dalam jangka menengah adalah meningkatnya partisipasi masyarakat secara aktif dan rutin dalam kegiatan Bank Sampah. Selain itu, diharapkan terbentuk kesadaran lingkungan masyarakat yang lebih kuat, meningkatnya kapasitas organisasi pengelola, tersusunnya sistem pengelolaan yang lebih tertib dan profesional, serta meningkatnya kualitas pengelolaan sampah terpilah di tingkat komunitas. Pada tahap ini, Bank Sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat menabung sampah, tetapi berkembang menjadi institusi sosial lingkungan berbasis masyarakat.

4. Outcome (Dampak Jangka Panjang)

Dalam kerangka model konseptual strategi implementasi, outcome merupakan tahap akhir yang menunjukkan dampak jangka panjang dari keseluruhan proses transformasi yang dimulai dari kondisi eksisting (*input*), dilanjutkan dengan intervensi strategi implementasi (proses), hingga menghasilkan perbaikan kondisi antara (*output*). Dalam konteks ini, implementasi Bank Sampah berbasis *Community Based Management* (CBM) diharapkan tidak hanya berhenti pada peningkatan partisipasi atau penguatan kelembagaan, tetapi mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Lebih lanjut, *outcome* atau dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berkelanjutan dan mandiri. Dampak tersebut meliputi meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, berkurangnya volume sampah rumah tangga yang dibuang ke TPS atau TPA, tumbuhnya budaya ekologis masyarakat, meningkatnya kesejahteraan ekonomi warga melalui ekonomi sirkular, serta terbentuknya tata kelola lingkungan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam konteks teori CBM, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penguatan kapasitas komunitas (*community empowerment*) yang mampu mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan secara partisipatif dan adaptif. *Outcome* ini juga selaras dengan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya *SDG 11* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan *SDG 12* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

Capaian ini merupakan akumulasi dari keberhasilan strategi pada tahap proses, terutama dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas partisipasi, serta membangun tata kelola yang efektif. Lebih lanjut, pencapaian *outcome* tersebut tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip *Good Environmental Governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam model konseptual ini, prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan seluruh proses implementasi agar tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga diakui secara sosial dan berkelanjutan secara institusional. Dengan demikian, Bank Sampah tidak hanya berperan sebagai instrumen pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan tata kelola lingkungan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, *outcome* dalam model konseptual ini tidak hanya dimaknai sebagai hasil akhir, tetapi sebagai indikator keberhasilan integrasi antara pendekatan *Community Based Management*, tata kelola publik, dan pembangunan berkelanjutan. Semakin kuat keterkaitan antara input, proses, dan output yang didukung oleh prinsip *Good Environmental Governance*, maka semakin besar pula peluang tercapainya dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Bank Sampah berbasis CBM pada akhirnya diukur dari kemampuannya dalam menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang partisipatif, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Strategi Implementasi Bank Sampah Berbasis CBM disampaikan dalam bentuk diagram dalam gambar 1, disamping itu peneliti menyusun Tabel 1 untuk memberikan gambaran lebih detail tentang strategi implementasi beserta aktor utama yang terlibat dalam setiap langkah strategi tersebut.

Hal ini didasarkan pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada aspek partisipasi yang belum stabil, kelembagaan yang belum kuat, serta tata kelola yang belum optimal. Secara rinci strategi utama yang dapat diimplementasikan dengan berbasis *Community Based Management* (CBM) yaitu :

a. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan komunitas menjadi strategi fundamental yang perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus, baik dari sisi manajerial, kepemimpinan, maupun administrasi organisasi. Selain itu, regenerasi kepengurusan perlu dilakukan secara terencana untuk menjaga keberlanjutan organisasi serta mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas program dan meningkatkan kinerja pengelolaan Bank Sampah.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas keterlibatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Strategi ini penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih didominasi oleh motivasi ekonomi dan belum sepenuhnya berbasis kesadaran lingkungan.

c. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola program perlu dilakukan melalui penyusunan aturan tertulis yang jelas, pengembangan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas administrasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Penguatan tata kelola ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program, sehingga mampu mendukung keberlanjutan kegiatan Bank Sampah secara sistematis.

d. Pengembangan kolaborasi multipihak

Pengembangan kolaborasi multipihak menjadi strategi penting dalam memperkuat dukungan eksternal terhadap program. Kolaborasi ini mencakup pelibatan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, baik dalam aspek pembiayaan, penyediaan sarana prasarana, maupun inovasi program. Sinergi antar pemangku kepentingan ini diperlukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas.

e. Integrasi Program Bank Sampah Dalam Pembangunan Daerah

Integrasi program Bank Sampah dalam pembangunan daerah perlu dilakukan agar program tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi bagian dari kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih luas. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, penganggaran, serta pengarusutamaan program dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin secara struktural.

Implementasi strategi tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bank Sampah tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap agenda pembangunan global.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan Community Based Management (CBM) memiliki potensi yang signifikan dalam pengelolaan sampah perkotaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan komunitas serta dukungan tata kelola yang memadai. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Elinor Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, dan kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya bersama, serta diperkuat oleh pandangan Arun Agrawal dan Clark Gibson (1999) yang menyatakan bahwa kelembagaan komunitas harus melibatkan faktor kepemimpinan lokal dan hubungan antar pemangku kepentingan yang kuat agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat telah menunjukkan adanya upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang cukup berkembang, namun belum mencapai kondisi yang optimal dan berkelanjutan. Program ini telah mampu membangun partisipasi masyarakat serta membentuk kelembagaan komunitas, tetapi masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, terutama dalam menjaga konsistensi partisipasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengoptimalkan tata kelola dan dukungan pemangku kepentingan.

Temuan penelitian secara tegas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Bank Sampah tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga

oleh kualitas kelembagaan komunitas serta efektivitas tata kelola yang mendukungnya. Partisipasi yang masih bersifat fluktuatif dan didominasi oleh motivasi ekonomi mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kebutuhan kolektif masyarakat. Di sisi lain, kelembagaan yang belum kuat serta dukungan eksternal yang belum terintegrasi menjadi faktor penghambat dalam mendorong keberlanjutan program secara sistematis. Dalam perspektif Community Based Management (CBM), kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi program Bank Sampah masih berada pada tahap partisipatif-operasional dan belum mencapai tahap kelembagaan-konsolidatif. Artinya, meskipun unsur dasar CBM telah terpenuhi, seperti adanya partisipasi masyarakat dan struktur organisasi, namun belum didukung oleh sistem aturan, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan strategi implementasi yang tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup penguatan kelembagaan komunitas, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, penguatan tata kelola program, pengembangan kolaborasi multipihak, serta integrasi program dalam kerangka pembangunan daerah. Kelima strategi ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menjadi kunci dalam mendorong transformasi program Bank Sampah dari sekadar kegiatan operasional menjadi sistem pengelolaan berbasis komunitas yang kuat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan Community Based Management (CBM) memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan dalam mengintegrasikan dimensi partisipasi, kelembagaan, dan tata kelola dalam satu kerangka yang utuh. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Bank Sampah di Kelurahan Cengkareng Barat telah menunjukkan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas yang cukup berkembang, namun keberlanjutannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat, sementara kesadaran lingkungan masih berkembang secara bertahap. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi partisipasi, lemahnya kelembagaan, keterbatasan kapasitas pengurus relawan, serta belum optimalnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan kemitraan eksternal. Model pengelolaan berbasis Community Based Management sudah terlihat, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan, kolaborasi multiaktor, dan profesionalisasi pengelolaan agar mampu mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, keberlanjutan program Bank Sampah tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat, tetapi juga pada dukungan kebijakan, kapasitas organisasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Sebagai implikasi dari temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih operasional dan aplikatif untuk memperkuat implementasi program Bank Sampah ke depan. Oleh karena itu, pada BAB selanjutnya akan diuraikan kesimpulan penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Bank Sampah berbasis Community Based Management di Kelurahan Cengkareng Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi dan kemudahan penggunaan teknologi terhadap efisiensi kerja karyawan melalui persepsi kemanfaatan sebagai variabel mediasi di Toko Megah Mulia, beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai berikut. Pertama, terbukti bahwa kemanfaatan persepsi ditingkatkan oleh penggunaan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens dan konsistensi karyawan menggunakan sistem informasi teknologi, semakin besar keyakinan mereka bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi pekerjaan mereka.

Selain itu, semakin mudah digunakan, teknologi tersebut juga berdampak positif dan signifikan pada kemanfaatan persepsi. Oleh karena itu, sistem yang mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan akan membuat karyawan merasa lebih baik tentang manfaat informasi teknologi dalam meningkatkan efektivitas kerja mereka.

Ketiga, penggunaan informasi teknologi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi kerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi optimal dapat mempercepat penyelesaian tugas, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Keempat, dampak kemudahan teknologi terhadap efisiensi kerja karyawan lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa kemudahan sistem meningkatkan efisiensi, tetapi efeknya menjadi lebih besar jika didukung oleh persepsi kemanfaatan yang tinggi. Kelima, persepsi kemanfaatan terbukti memiliki pengaruh paling dominan terhadap efisiensi kerja karyawan, dan juga berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kemudahan penggunaan teknologi informasi dan efisiensi kerja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi bukan satu-satunya faktor yang menentukan efisiensi kerja karyawan, tetapi juga keyakinan karyawan bahwa teknologi itu benar-benar bermanfaat bagi pekerjaan mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam organisasi bergantung pada dua hal: fitur teknis sistem dan perasaan pengguna tentang manfaat teknologi.

REFERENSI

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: the role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649.
- Agamuthu P, Babel S. Waste management developments in the last five decades: Asian perspective. *Waste Manag Res*. 2023 Dec;41(12):1699-1716. <https://doi.org/10.1177/0734242X231199938>
- Agus Riyadi, Atika Rahmasari, Sugiarto (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 8 No. 1 January - June 2022. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i1.5873>
- Ansell, Chris & Gash, Alison. (2008). Collaborative Governance in Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Astuti, R. D., Linarti, U., & Sa'ban, D. M. (2021). Supporting Factors for Community Participation in the Waste Bank Program: A Study in Sleman Regency of Indonesia.

- Jurnal Optimasi Sistem Industri, 20(1), 33–41. <https://doi.org/10.25077/josi.v20.n1.p33-41.2021>
- Burhanuddin, Harjito, Mega Trishuta Pathiassana, Rimba Trishuta Pathiussina (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Semamung." *Jurnal Tambora*, 5 (2), 87-96, <https://doi.org/10.36761/jt.v5i2.1130>
- Badan Pusat Statistik (2025), *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2025*. Vol 44-2025, Badan Pusat Statistik ISSN 0216-6224
- Bambang Arianto (2024), *Triangulasi Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Oktober 2024, Borneo Novelty Publishing, ISBN : 978-623-10-4165-4
- Belbase, N.P. (2010). *Environmental Good Governance in the Future Constitution of Nepal*. IUCN Nepal
- Candrakirana, R. (2015). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*. *Yustisia*, 4(3), 581-601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (2025), *Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024*, <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/buku-profil-perkembangan-kependudukan/>
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, *Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Sampah 2025 – 2026*. https://plasticsmartcities.wwf.id/storage/user_uploads/a3a837eab802ef5bbf9472a94c98183c.pdf
- Gunawan, M. A., & Ansyori, M. M. (2023). *Factors Affecting Community Participation In The Waste Bank Program In The City Of Semarang*. *Jurnal Ekonomi*, 12(3), 2197–2207. Retrieved from <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/2517>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanti, Kurniawati, & Ahmad Fachrurrozi (2017). *Analisis Sikap dan Perilaku Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Bank Sampah (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Bahagia Bekasi Utara)*. *Optimal: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam "45" Bekasi*, 10[2], 185-198. <https://media.neliti.com/media/publications/154615-ID-analisis-sikap-dan-perilaku-masyarakat-t.pdf>
- Namira A.T, Restu K.R (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Malang pada Tahun 2022-2023*. *Journal of Governance and Policy*, 5(1), 50-67. <https://doi.org/10.21776/ub.jgp.2025.01.4>